



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
INSPEKTORAT

Jalan Raya Tuapejat Km.4 Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Email:inspektoratmtw@gmail.com

Nomor : 700/16/LHE/Insp-KKM/I-2026 Tuapejat, 21 Januari 2026
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan *Monitoring Controlling
Surveillance for Prevention* (MCSP)
Tahun 2025.

Kepada Yth.
Bupati Kepulauan Mentawai
di
Tuapejat

Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan instrumen strategis dalam upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. MCSP dirancang untuk memastikan bahwa area-area rawan korupsi dapat dipetakan, dikendalikan, dan diawasi secara efektif melalui indikator-indikator pencegahan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Melalui pelaksanaan MCSP, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperbaiki proses bisnis, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada sektor-sektor strategis.

Evaluasi atas pelaksanaan MCSP Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat capaian indikator pencegahan korupsi, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta mengukur efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan MCSP pada periode selanjutnya.

Dengan disusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan MCSP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi implementasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekaligus menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dan penguatan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan melayani.

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;
2. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
3. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.1-1 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko dilingkungan Inspektorat Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 Perihal Pedoman Penilaian *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah melalui *Monitoring Center Surveillance For Prevention* (MCSP) KPK dan hasil Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

2. Tujuan

Melakukan inovasi pencegahan korupsi daerah untuk meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Kabupaten Kepulauan Mnetawai Tahun 2026.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan *Monitoring Center Surveillance For Pervation* (MCSP) KPK di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pelaksanaan tugas koordinasi pemberantasan korupsi oleh KPK berdasarkan pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi “*koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik*”

MCSP KPK Tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah menerima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 Perihal Pedoman Penilaian *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025 dengan menetapkan 8 area pencegahan. Atas surat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk Inspektorat sebagai admin dan koordinator MCSP KPK 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat yang berbunyi "*Inspektorat menyelenggarakan fungsi pelaksana koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi*".
2. Melakukan Dsiminasi Peluncuran Indikator MCSP KPK 2025 dari tanggal 17 s/d 21 Maret 2025 di melalui *zoom meeting* yang diikuti ole Perangkat Daerah pengampu 8 aera MCSP KPK Tahun 2025 oleh seluruh kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektorat melakukan koordinasi dengan OPD terkait atas pemenuhan dokumen bukti dukung MCSP KPK 2025 sampai dengan akhir bulan Desember 2025.
4. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi dokumen bukti dukung 8 area Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah dengan menetapkan OPD Penanggungjawab masing-masing. Dalapan area dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1
Area, Aspek dan Indikator MCSP KPK Tahun 2025

NO	AREA	ASPEK	INDIKATOR
I	Perencanaan	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Transparansi - Transparansi perencanaan pembangunan daerah 2. Regulasi - Regulasi Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Aspek Akuntabilitas - Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Pembangunan Daerah - Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan - Partisipasi Masyarakat dan Kepatuhan

			<p>Hasil Fasilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak Lanjut Hasil Reviu RKPD
		Pokok Pikiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Pokok Pikiran 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Daerah terkait Kepatuhan Pokok Pikiran 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Pokok Pikiran - Ketepatan Waktu Pokok Pikiran - Pelaksanaan Pokok Pikiran
		Penyaluran hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi hibah dan bantuan pemerintah 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan Bantuan Hibah - Regulasi dan Kebijakan Bantuan Pemerintah 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah - Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosia - Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan
II	Anggaran	Pencegahan terjadinya penggelembungan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Standar Harga Satuan (SHS) - Transparansi Analisis Standar Biaya 2. Regulasi dan Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan Standar Harga Satuan - Regulasi dan Kebijakan Analisis Standar Biaya 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Penyusunan Standar Harga Satuan - Tindak Lanjut Reviu SHS - Akuntabilitas Penyusunan Analisis Standar Biaya - Tindak Lanjut Reviu ASB - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Honorarium dan Perjalanan Dinas
III	PBJ	Pelaksanaan PBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi pelaksanaan PBJ 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa - Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK
		PBJ Strategis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pelaksanaan Pengadaan - Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima
		PBJ Non Kostruksi melalui E-Purchasing	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi e- Katalog 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan Implementasi e- Purchasing 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Perencanaan PBJ melalui e- Purchasing - Persiapan Implementasi e- Purchasing - Proses Pemilihan Penyedia - Proses Serah Terima
IV	Pelayanan Publik	Sektor Perizinana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Tranparansi Tata Ruang 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan dalam rangka pencegahan korupsi layanan perizinan - Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mencegah terjadinya korupsi dalam penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Proses Perizinan Pemerintah Daerah - Forum Konsultasi Publik (Perizinan) - Survei Kepuasan Masyarakat (Perizinan) - Penanganan Pengaduan Perizinan - Tindak Lanjut Reviu Layanan Perizinan
		Sektor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi

		Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi persyaratan pendaftaran peserta didik baru 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor Pendidikan 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pelaksanaan SPMB - Forum Konsultasi Publik (Pendidikan) - Survei Kepuasan Masyarakat (Pendidikan) - Penanganan Pengaduan Sektor Pendidik
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi layanan Kesehatan 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor Kesehatan 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan pelayanan Kesehatan - Forum Konsultasi Publik (Kesehatan) - Survei Kepuasan Masyarakat (Kesehatan) - Penanganan Pengaduan Sektor Kesehatan - Tindak Lanjut Reviu Layanan RSUD
		Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 2. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kependudukan dan pencatatan sipil 3. Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - update data secara berkala - Forum Konsultasi Publik (Kependudukan) - Survei Kepuasan Masyarakat (Kependudukan) - Penanganan Pengaduan Sektor Kependudukan dan Catatan Sipi
V	Manajemen ASN	Tata Kelola Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Transparansi <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi manajemen ASN

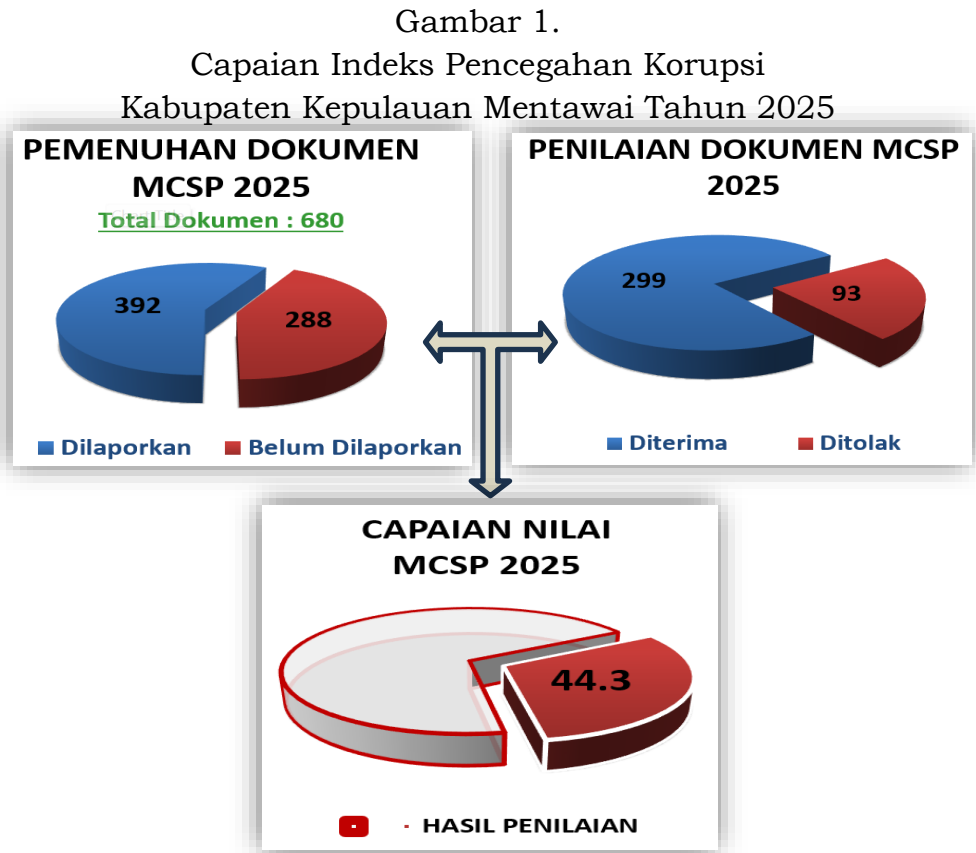
		ASN	<p>2.Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN <p>3.Akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kinerja ASN - Kepatuhan LHKPN - Budaya Antikorupsi - Penegakan Kode Etik dan Disiplin - Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN
VI	BMD	Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator Database BMD - Pengelolaan BMD - Pengamanan Hukum - Pemanfaatan BMD - Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD - Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD - Penyalahgunaan BMD - Penertiban BMD - Tindak Lanjut Reviu pengelolaan BMD
VII	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Pencegahan Terjadinya Kebocoran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi Pendapatan Daerah - Pembayaran Online - Regulasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah - Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah - Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Penagihan Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah - Pengawasan Pajak dan Retribusi - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
VIII	APIP	Penguatan APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan Anggaran APIP - Anggaran Sarana dan Prasarana - Kecukupan Kuantitas SDM - Peningkatan Kompetensi SDM - Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat - Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC) - Pengawasan Dugaan Penyimpangan

			<ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus - Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) - Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan - Probitiy Audit - Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi - Tindak Lanjut SPI
--	--	--	---

5. Mengupload dokumen bukti dukung MCP KPK ke aplikasi jaga.id.

B. Hasil

Pelaksanaan pemenuhan bukti dukung *Monitoring Center Surveillance For Prevention* (MCSP) dilakukan di minggu pertama bulan April Tahun 2025 sampai dengan batas akhir dari penginputan dokumen/bukti dukung tanggal 5 Desember 2025. Hasil pemenuhan bukti dukung diperoleh capaian Indeks Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dengan kondisi sebagai berikut:



Dari total dokumen pemenuhan MCSP Tahun 2025 sebanyak 680, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pemenuhan dokumen/bukti dukung sebanyak 58%, sebanyak 42% bukti dukung belum dapat dipenuhi. Dari pemenuhan dokumen tersebut dokumen yang diterima dan diberi penilaian sebanyak 76% dan sebanyak 24% ditolak, sehingga perolehan nilai Indeks Pencegahan Korupsi berada diangka 44,1 (Zona Merah).

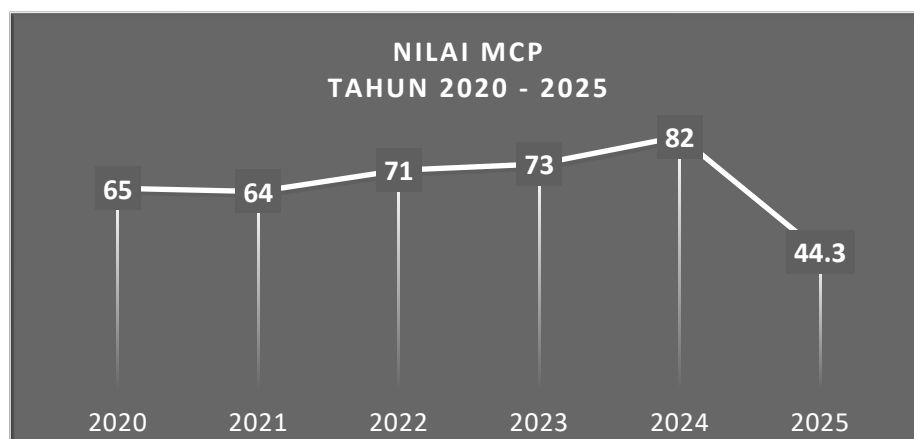
Rincian pemenuhan 8 (delapan) area MCSP KPK Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian pemenuhan 8 (delapan) area MCSP KPK

No	Area MCSP	Komponen Nilai	Jumlah Dokumen	Dilaporkan	Belum Dilaporkan	Diterima	Ditolak	Perolehan Nilai
1	Perencanaan	18%	140	105	35	78	27	57.8
2	Anggaran	15%	77	46	31	35	11	55.1
3	PBJ	24%	108	23	85	19	4	22.6
4	Yanblik	10%	149	74	75	49	25	36.1
5	M-ASN	6%	40	22	18	13	9	40.3
6	BMD	8%	56	33	23	33	0	33.1
7	OPD	7%	26	15	11	11	4	37.1
8	APIP	12%	84	74	10	61	13	72.6
TOTAL		100%	680	392	288	299	93	44.3

Capaian nilai Indeks Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan sejak 5 (lima) tahun terakhir. Grafik peningkatan tersebut sebagai berikut:

Gambar 2
Grafik Capaian Indeks Pencegahan Korupsi



Indeks Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 diangka 44.3 dengan perolehan peringkat 466

secara nasional dari 546 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dan peringkat 18 secara regional dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penurunan terhadap pemenuhan dokumen bukti dukung di 8 area MCSP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, dikarenakan tidak terpenuhinya pelaporan bukti dukung sebagai berikut:

Tabel 3
Bukti Dukung MCSP 2025 Belum dilaporkan

NO	DOKUMEN
I	AREA PERENCANAAN
1	Tangkap layar (screenshot) dan link website rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 (dimasukkan pada keterangan).
3	Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026.
4	Daftar dan dokumen Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025.
5	Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renja pada APBD Murni Tahun 2026 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah).
6	Peraturan/Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah).
7	Form Konsistensi Program antara RPJMD/RPD Tahun Pelaksanaan 2026 Dan RKPD Tahun 2026 (Hal. 85 Permendagri 10/2025)
8	Form Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2026 (Hal 90 Permendagri 10/2025)
9	Form Daftar Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Hal 95 Permendagri 10/2025)
10	Form Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Hal 103 Permendagri 10/2025).
11	Form Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan (Hal 109 Permendagri 10/2025).
12	Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif yang menunjukkan tidak ada perbedaan RKPD dengan RKA pada APBD Tahun 2026
13	Notulen dan Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif yang menunjukkan ada perbedaan RKPD dengan RKA pada APBD Tahun 2026
14	Rekap rekomendasi fasilitasi RKPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Murni Tahun 2026.
15	Surat Kepala Daerah atau Sekda menginformasikan tentang kamus usulan pokok pikiran tahun 2026 kepada DPRD
16	Informasi Pengusul yang dipublikasikan untuk penyaluran hibah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengusul dan identitas (baik data pengusul yang disetujui maupun ditolak, bagi yang ditolak diberikan informasi alasan penolakan); - Objek usulan; - Total nilai; - Pihak yang melaksanakan. - Media publikasi penyaluran hibah antara lain website resmi pemda, media sosial resmi pemda, dan/atau media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
17	Informasi Penerima yang dipublikasikan untuk penyaluran hibah tahun 2025 di Media publikasi penyaluran hibah antara lain website resmi pemda, media sosial resmi pemda, dan/atau media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
18	Informasi Pengusul yang dipublikasikan untuk bantuan pemerintah tahun 2025 di Media publikasi penyaluran bantuan pemerintah antara lain website resmi pemda, media sosial resmi pemda, dan/atau media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
19	Informasi Penerima yang dipublikasikan untuk bantuan pemerintah tahun 2025 di Media publikasi penyaluran bantuan pemerintah antara lain website resmi pemda, media sosial resmi pemda.
20	Laporan analisa APBD 2026
21	Dokumen proposal bantuan social
22	BA yang sudah diverifikasi dan validasi dokumen 10 (bila ada)
23	Dokumen pembuktian data penerima tahun 2024 dan 2025 tidak diberikan secara berulang
24	Dokumen proposal bantuan keuangan
II	Area Anggaran
1	Screenshot publikasi Perkada/SK pada website Pemda beserta tanggal publikasi
2	Surat keterangan Sekda apabila SHS Murni 2025 dengan SHS Perubahan Tahun 2025 masih sama
3	Screenshot Publikasi Perkada ASB ke dalam website Pemda
4	Probis penyusunan dan penetapan SHS tanpa menyebutkan tahun anggaran
5	SOP tentang Penyusunan dan Penetapan ASB
6	Perkada penetapan ASB fisik
7	Perkada penetapan ASB non fisik yang masih berlaku pada APBD Murni Tahun 2025
8	Kertas Kerja Penyusunan SHS yang digunakan untuk APBD tahun 2026
9	Laporan Tim Penyusun SHS terkait dengan hasil Penyusunan SHS yang masih berlaku di tahun 2025.
10	Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil rewiu SHS
11	Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil rewiu SHS Tahun 2026
12	Kertas Kerja
13	Laporan Tim Penyusun ASB (Fisik dan Non Fisik) terkait hasil penyusunan ASB
14	Capture penggunaan data dari K/L atau BA pembahasan, sebagai

	bukti utilisasi data instansi vertikal dalam penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik).
15	Hasil reviu ASB inspektorat atas ASB Tahun 2026
III	AREA PBJ
1	Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas PU
2	Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK dan Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Daerah
3	Reviu Perencanaan PBJ Dokumen hasil reviu Perencanaan PBJ Tahun 2025 (yang menghasilkan konsolidasi) oleh TAPD dan UKPBJ pada tahap penganggaran APBD (Setelah Tersedianya RKA)
4	Dokumen kontrak konsolidasi pengadaan tahun 2025 oleh PA/ KPA konsolidator pada 3 OPD Strategis Dinas Pendidikan, Kesehatan dan PUPR
5	Rencana Kebutuhan BMD pada PBJ Strategis Tahun 2025
6	Kelengkapan perizinan pada PBJ Strategis Tahun 2025
7	Kesesuaian RPJMD dan RKPD dengan PBJ Strategis Tahun 2025
8	Hasil Studi kelayakan untuk PBJ Strategis Tahun 2025
9	Surat Penetapan Pemenang PBJ Strategis Tahun 2025
10	Hasil Review HPS PBJ Strategis Tahun 2025
11	Notulensi pembahasan rancangan kontrak pada PBJ Strategis Tahun 2025 turut ditandatangani oleh Inspektorat, Biro/Bagian Hukum, dan UKPBJ
12	Notulensi pembahasan/bedah kontrak untuk PBJ Strategis Tahun 2025 sudah ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama penyedia
13	Perjanjian/ Kontrak pada PBJ Strategis Tahun 2025
14	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada PBJ Strategis Tahun 2025
15	Laporan pelaksanaan sosialisasi atas PBJ tahun 2025 yang dilaksanakan melalui e- purchasing dan perlu dilengkapi oleh daftar hadir OPD yang melaksanakan kegiatan PBJ Tahun 2025 melalui mekanisme e-purchasing.
16	Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan Implementasi e-Purchasing yang memuat Pedoman Pelaksanaan e-Purchasing
17	SK Pembentukan Tim Teknis e-Purchasing yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA.
18	Laporan pelaksanaan bimbingan teknis tentang teknis negosiasi dalam e-purchasing bagi seluruh PPK dan PP pada 3 OPD Pupr, Pendidikan Dan Kesehatan
19	Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui e-katalog yang memuat kertas kerja secara lengkap
20	Tangkapan Layar minimal 3 penyedia paket non-konstruksi
21	Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan untuk paket non konstruksi
IV	AREA PELAYANAN PUBLIK
	SEKTOR PERIZINAN
1	Data Jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW
2	Naskah Akademik

3	Ranperda RDTR
5	Produk hukum daerah tentang penetapan Standar Pelayanan perizinan dan nonperizinan (PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014)
6	Produk hukum daerah tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan
7	SOP Terintegrasi antara DPMPTSP dengan OPD Teknis (minimal 5 SOP terintegrasi antara DPMPTSP dengan OPD Teknis)
8	Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
9	Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik
10	Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025
11	Laporan telaah dalam rangka tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tentang kendala penerbitan perizinan yang disampaikan oleh OPD
	SEKTOR PENDIDIKAN
12	Rekapitulasi sekolah yang telah dan belum mempublikasikan informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru (mencakup rombongan belajar dan daya tampung) pada portal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online dan/atau Offline
13	Screenshot/ foto publikasi online dan/atau offline anti suap/gratifikasi/ pungli di seluruh sekolah pada saat pendaftaran peserta didik baru
14	Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/pungli di sektor pendidikan.
15	Sampel SK Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru
16	Rekapitulasi daftar nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) (sesuai kewenangan pemda) dan Nomor SK Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang terbit
17	Laporan kegiatan sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifikasi/ pungli yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan SPMB tahun berjalan.
18	Materi Sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli.
19	Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
20	Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik
21	Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester
22	Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat
23	Kanal Pengaduan pada Sektor Pendidikan (bisa menjadi satu dengan kanal pengaduan Pemda)
24	Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sektor pendidikan
25	Laporan hasil telaah dalam rangka tindak lanjut penanganan pengaduan
	SEKTOR KESEHATAN
26	Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait dengan larangan penyuapan/ gratifikasi/ pungli di sektor kesehatan pada tahun berjalan atau satu tahun sebelumnya.
27	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah Daerah (sesuai Permenkes No. 12 Tahun 2020)

28	Rekapitulasi daftar Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan akreditasinya
29	Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sektor Kesehatan
30	Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik
31	Laporan hasil survei kepuasan masyarakat
32	Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat
33	Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Sektor Kesehatan
34	Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor kesehatan
V	MANAJEMEN ASN
1	Dokumen regulasi manajemen talenta dan pedoman teknis
2	Ijin Prinsip (BKN)
3	Sistem Informasi manajemen talenta
4	Dokumen penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN yang disahkan oleh PPK (Surat Keputusan)
5	SK Penetapan oleh PPK pada seluruh penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN tahun 2025
6	Rekapitulasi pakta integritas pegawai
7	pakta integritas pegawai
8	Surat Edaran terkait dengan Pengendalian Gratifikasi di seluruh sektor Pemerintah Daerah
9	SOP yang mengatur Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN
VI	AREA BMD
1	Draft atau Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
2	Regulasi/ pedoman IPA BMD untuk pengguna barang di Pemda
3	Timeline, target, dan anggaran untuk tahun berjalan diupload dalam 1 file
4	Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) yang disahkan dan ditandatangani oleh Sekda.
5	Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan untuk pengukuran kepada BPN yang ditandatangani oleh Pejabat Pemda terkait
6	Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan untuk sertifikasi kepada BPN yang ditandatangani oleh Pejabat Pemda terkait
7	Dokumen jumlah bidang BMD-tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan yang ditandatangani oleh Pemda dan Kantah setempat
8	Dokumen Penetapan RKBMD tahun berikutnya (yang sudah disahkan)
9	Dokumen Surat Pengantar Penyampaian Laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD)
10	Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD)
11	Rekapitulasi jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan

	BMD tepat waktu kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD)
12	Laporan BMD kepada Kemendagri
13	Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah
14	Dokumen Surat Pengantar Penyampaian Laporan BMD semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD)
15	Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD)
16	Rekapitulasi jumlah Pengguna Barang yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/ BPAD)
17	Laporan BMD kepada Kemendagri
18	Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. Deadline paling lambat minggu IV bulan Agustus tahun berjalan
19	Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya
20	Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi
VII	AREA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
1	Laporan pajak yang disajikan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
2	Kertas kerja atau dokumen lain yang bisa menunjukkan perhitungan potensi pajak
3	Database / Dokumen Rekonsiliasi/ Pertukaran Data pajak terintegrasi dengan perizinan dan keuangan daerah
4	Dokumen potensi penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah tahun berjalan.
5	Dokumen yang menunjukkan alur pembayaran pajak daerah secara online melalui lembaga keuangan
6	SK Kepala Daerah/ Kepala OPD (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) tentang SOP tata cara pemungutan Pajak Daerah.
7	SK Kepala Daerah/ Kepala OPD (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) tentang SOP Opsen.
8	Keputusan Kepala Daerah/ Kepala OPD (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) tentang peta jalan elektronifikasi transaksi Pemda atas penerimaan daerah
9	Laporan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah
10	Dokumen target pajak daerah, realisasi pajak daerah, dan retribusi pajak daerah yang sah
11	Dokumen berisi data capaian pajak yang sudah diaudit BPK
12	Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet

13	Buku I Laporan BPK
14	Dokumen laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
VIII	AREA APIP
1	Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA (Surat Rekomendasi maksimal terbit tahun 2021)
2	Surat oleh Kepala Daerah kepada Gubernur/Mendagri terkait dengan konsultansi pemberhentian Inspektur atau Irban
3	Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan terhadap kerahasiaan laporan dan kerahasiaan identitas pelapor; - Perlindungan terhadap karier pelapor yang berstatus ASN - dan Kewajiban bagi ASN untuk melaporkan pelanggaran
4	Whistleblowing system (WBS)
5	Surat permohonan QA oleh inspektur kepada Kepala BPKP Perwakilan
6	Hasil QA lengkap oleh BPKP Perwakilan

III. PENUTUP

A. Simpulan

Dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan *Monitoring Center Surveillance for Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kab. Kep. Mentawai Tahun 2025 diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkhusus OPD yang bertanggung jawab atas pemenuhan dokumen bukti dukung MCSP KPK dapat meningkatkan peran dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam memaksimalkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah untuk tahun 2026

B. Saran

1. Agar Pimpinan OPD melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap permintaan dokumen bukti dukung MCSP KPK untuk tahun 2026.
2. Agar Pimpinan OPD menetapkan dan menunjuk penanggungjawab atas pemenuhan dokumen bukti dukung MCSP KPK untuk tahun 2025.

Tuapeijat, 21 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH.

SERIELI BAWAMENEWI, SH. CGCAE
Nip. 19830905 200802 1 001

